

ABSTRACT

Tax is one source of significant revenue for the state. The government continued to try to increase revenues from the tax sector by making innovations, both in terms of legislation and taxation system. The purpose of this research is to determine whether there is a significant difference in the amount of income tax payable use Income Tax Act No. 17 In 2000 and Income Tax Act No. 36 In 2008 . This method of research using hypothetical test methods. The data in this research are taken from the employee payroll in the production department in PT “X” . The data in this research were analyzed using Paired Samples T Test. The results show that there is a significant difference between the amount of income tax payable according to Income Tax Act No. 17 In 2000 and Income Tax Act No. 36 In 2008 .

Keywords: Income Tax Act No. 36 In 2008, Income Tax Act No. 17 In 2000, income tax payable

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting. Pemerintah terus berusaha untuk dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dengan melakukan pembaharuan-pembaharuan, baik dari segi perundang-undangnya maupun dari sistem perpajakannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan besarnya PPh 21 yang terutang menurut UU PPh No. 17 Tahun 2000 dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan metode pengujian hipotesis. Data diambil dari daftar gaji karyawan bagian produksi di PT “X”. Data dianalisis menggunakan *Paired Samples T Test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah pajak penghasilan terutang menurut UU No. 17 Tahun 2000 dengan UU No. 36 Tahun 2008.

Kata Kunci: UU No. 36 Tahun 2008, UU No. 17 Tahun 2000, pajak penghasilan terutang

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian	6

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka.....	7
2.1.1 Pajak.....	7
2.1.1.1 Pengertian Pajak.....	7
2.1.1.2 Fungsi Pajak.....	8

2.1.1.3	Syarat Pemungutan Pajak	10
2.1.1.4	Asas Pemungutan Pajak.....	11
2.1.1.5	Teori Pemungutan Pajak	14
2.1.1.6	Sistem Pemungutan Pajak.....	16
2.1.1.7	Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil	18
2.1.1.8	Timbul dan Berakhirnya Utang Pajak.....	19
2.1.1.9	Hambatan Pemungutan Pajak	21
2.1.1.10	Tarif Pajak.....	22
2.1.1.11	Jenis Pajak.....	23
2.1.2	Pajak Penghasilan (PPh).....	26
2.1.2.1	Pengertian PPh	26
2.1.2.2	Subjek Pajak.....	26
2.1.2.3	Bukan Subjek Pajak	30
2.1.2.4	Objek Pajak	31
2.1.2.5	Penghasilan yang Dipotong Pajak Bersifat Final.....	36
2.1.2.6	Bukan Objek Pajak	37
2.1.2.7	Biaya-Biaya dalam Perhitungan PPh	40
2.1.3	PPh Pasal 21	42
2.1.3.1	Pengertian	42
2.1.3.2	Wajib Pajak PPh Pasal 21	43
2.1.3.3	Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21	44
2.1.3.4	Objek Pajak PPh Pasal 21	45
2.1.3.5	Tidak Termasuk Objek Pajak PPh Pasal 21	47
2.1.3.6	Pemotong Pajak PPh Pasal 21.....	48

2.1.3.7	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21	50
2.1.3.8	Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak PPh Pasal 21 ..	51
2.1.3.9	Pengurangan yang Diperbolehkan	54
2.1.3.10	SPT (Surat Pemberitahuan).....	58
2.1.3.11	Nomor Pokok Wajib Pajak	60
2.1.4	Perbandingan UU PPh No. 17 Tahun 2000 dengan UU PPh	
	No. 36 Tahun 2008	61
2.1.4.1	Subjek Pajak (Pasal 2 Ayat 5).....	61
2.1.4.2	Objek Pajak	62
2.1.4.3	Pengecualian dari Objek Pajak (Pasal 4 Ayat 3).....	65
2.1.4.4	Biaya Pengurang Penghasilan Bruto.....	67
2.1.4.5	Isteri yang Memilih untuk Menjalankan Hak dan Kewajiban Perpajakannya Sendiri (Pasal 8 Ayat 2)	69
2.1.4.6	Norma Penghitungan Penghasilan Netto (Pasal 14 Ayat 2).....	69
2.1.4.7	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	70
2.1.4.8	Tarif Pajak.....	70
2.1.4.9	Pencegahan Penghindaran Pajak (Pasal 18).....	73
2.1.4.10	Pemotongan/Pemungutan	74
2.1.4.11	Kredit Pajak Luar Negeri (Pasal 24).....	76
2.1.4.12	Angsuran Pajak Tahun Berjalan (Pasal 25)	76
2.1.4.13	Ketentuan Perpajakan Pertambangan dan Syariah (Pasal 31D).....	77
2.1.4.14	Fasilitas Perpajakan Bagi UMKM (Pasal 31E)	77

2.1.5 Contoh Penghitungan PPh Pasal 21	78
2.2 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis.....	80

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian.....	86
3.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan	86
3.1.2 Struktur Organisasi	89
3.1.3 Uraian Tugas dalam PT “X”	89
3.2 Metode Penelitian	91
3.2.1 Metode yang Digunakan	92
3.2.2 Populasi Penelitian	93
3.2.3 Sampel Penelitian.....	93
3.2.4 Teknik Penarikan Sampel	93
3.2.5 Teknik Pengumpulan Data.....	94
3.2.6 Metode Analisis	95
3.2.7 Hipotesis	95

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data.....	98
4.2 Hasil Perhitungan Data	100
4.2.1 Perhitungan Menurut UU No. 17 Tahun 2000.....	100
4.2.2 Perhitungan Menurut UU No. 36 Tahun 2008.....	105
4.2.3 Cara Perhitungan Data	110
4.3 <i>Paired Samples T Test</i>	112

4.4 Pembahasan.....	114
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan.....	115
5.2 Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	119
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	121

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	85
Gambar 2 Struktur Organisasi PT “X”.....	89

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I	PTKP UU No. 36 Tahun 2008 56
Tabel II	Tarif UU No. 36 Tahun 2008 57
Tabel III	Perbandingan Subjek Pajak UU No. 17 Tahun 2000 dengan UU No. 36 Tahun 2008 61
Tabel IV	Perbandingan Objek Pajak UU No. 17 Tahun 2000 dengan UU No. 36 Tahun 2008 62
Tabel V	Perbandingan Pengecualian Objek Pajak UU No. 17 Tahun 2000 dengan UU No. 36 Tahun 2008 65
Tabel VI	Perbandingan Biaya Pengurang Penghasilan Bruto UU No. 17 Tahun 2000 dengan UU No. 36 Tahun 2008 67
Tabel VII	Perbandingan Isteri yang Memilih untuk Menjalankan Hak dan Kewajiban Perpajakannya Sendiri UU No. 17 Tahun 2000 dengan UU No. 36 Tahun 2008 69
Tabel VIII	Perbandingan Norma Penghitungan Penghasilan Netto UU No. 17 Tahun 2000 dengan UU No. 36 Tahun 2008 69
Tabel IX	Perbandingan PTKP UU No. 17 Tahun 2000 dengan UU No. 36 Tahun 2008 70
Tabel X	Tarif WPOP UU No. 17 Tahun 2000 70
Tabel XI	Tarif WPOP UU No. 36 Tahun 2008 71
Tabel XII	Tarif WP Badan UU No. 17 Tahun 2000 71
Tabel XIII	Perbandingan Tarif Wajib Pajak Perseroan Terbuka dan Tarif Dividen UU No. 17 Tahun 2000 dengan UU No. 36

	Tahun 2008	72
Tabel XIV	Perbandingan Pencegahan Penghindaran Pajak UU No. 17	
	Tahun 2000 dengan UU No. 36 Tahun 2008	73
Tabel XV	Perbandingan Tarif Non NPWP dengan NPWP	74
Tabel XVI	Perbandingan Saat Terutang UU No. 17 Tahun 2000 dengan	
	UU No. 36 Tahun 2008	74
Tabel XVII	Perbandingan Objek PPh Pasal 21 UU No. 17 Tahun 2000	
	dengan UU No. 36 Tahun 2008	74
Tabel XVIII	Perbandingan Tarif PPh Pasal 23 UU No. 17 Tahun 2000	
	dengan UU No. 36 Tahun 2008	75
Tabel XIX	Perbandingan Objek Pasal 26 UU No. 17 Tahun 2000 dengan	
	UU No. 36 Tahun 2008	75
Tabel XX	Perbandingan Kredit Pajak Luar Negeri UU No. 17	
	Tahun 2000 dengan UU No. 36 Tahun 2008	76
Tabel XXI	Perbandingan Angsuran Pajak Tahun Berjalan UU No. 17	
	Tahun 2000 dengan UU No. 36 Tahun 2008	76
Tabel XXII	Perbandingan Ketentuan Perpajakan Pertambangan dan Syariah	
	UU No. 17 Tahun 2000 dengan UU No. 36 Tahun 2008	77
Tabel XXIII	Perbandingan Fasilitas Perpajakan Bagi UMKM UU No. 17	
	Tahun 2000 dengan UU No. 36 Tahun 2008	77
Tabel XXIV	Daftar Gaji Karyawan Bagian Produksi.....	98
Tabel XXV	Hasil Perhitungan Menurut UU No. 17 Tahun 2000	100
Tabel XXVI	Hasil Perhitungan Menurut UU No. 36 Tahun 2008	105
Tabel XXVII	<i>Paired Samples Statistics</i>	113

Tabel XXVIII <i>Paired Samples Correlations</i>	114
Tabel XXIX <i>Paired Samples Test</i>	114
Tabel XXX Hasil Perhitungan PPh 21 menurut UU No. 17 Tahun 2000	115
Tabel XXXI Hasil Perhitungan PPh 21 menurut UU No. 36 Tahun 2008	116